



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 2981-2986

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Analisis Perlakuan Akuntansi Dalam Pendapatan Sewa Alat Berat Berdasarkan PSAK 73 (Studi Kasus Pada PT. Bina Pertiwi)

<sup>1</sup>Yolanda Liaran, <sup>2</sup>Agresya Alia Padudung, <sup>3</sup>Erna Pasanda, <sup>4</sup>Carolus Askikarno Palallangan

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar, Sulawesi Selatan  
<sup>1</sup>[simbongyola@gmail.com](mailto:simbongyola@gmail.com), <sup>2</sup>[alya.padudung@gmail.com](mailto:alya.padudung@gmail.com), <sup>3</sup>[erna@ukipaulus.ac.id](mailto:erna@ukipaulus.ac.id), <sup>4</sup>[carolus@ukipaulus.ac.id](mailto:carolus@ukipaulus.ac.id)

### Abstrak

Bisnis penyewaan alat berat memainkan peran krusial dalam mendukung sektor konstruksi, pertambangan, dan infrastruktur di Indonesia. PT Bina Pertiwi, sebagai lessor utama dan anak perusahaan PT United Tractors Tbk yang didirikan pada 1976, menghadapi tantangan signifikan dalam menerapkan pengakuan pendapatan sewa sesuai PSAK 73 tentang Sewa. Standar ini mewajibkan pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa di laporan keuangan, yang berdampak langsung pada posisi keuangan, kinerja, serta strategi jangka panjang perusahaan. Penelitian ini mengadopsi paradigma positivisme dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menganalisis penerapan PSAK 73 secara komprehensif di PT Bina Pertiwi, termasuk penyewaan traktor Kubota, forklift Komatsu, dan alat berat lainnya. Data primer dikumpul melalui wawancara mendalam dengan manajemen serta observasi dokumen internal, sementara data sekunder dari laporan keuangan audited dan literatur akuntansi terkini. Analisis dilakukan via reduksi data, verifikasi, dan penyajian untuk mengevaluasi kesesuaian praktik akuntansi sewa alat berat. Hasil menunjukkan PT Bina Pertiwi mengklasifikasikan transaksi sebagai sewa operasi, karena tidak ada pengalihan kepemilikan atau opsi pembelian berharga rendah; risiko dan manfaat aset tetap pada lessor. Pendapatan sewa diakui secara garis lurus berdasarkan prinsip akrual, aset dicatat di neraca sesuai faithful representation, dengan pengungkapan transparan yang meningkatkan keterbandingan laporan dan stabilitas arus kas tanpa beban aset hak guna di neraca lessee. Temuan ini menegaskan kepatuhan perusahaan terhadap standar, mendukung keberlanjutan bisnis penyewaan alat berat di tengah dinamika industri.

*Kata kunci:* PSAK 73 (Pendapatan Sewa), Penyewaan Alat Berat, Sewa Operasi, Pengakuan Pendapatan sewa dan Laporan Keuangan.

### 1. Latar Belakang

Bisnis penyewaan alat berat merupakan sektor strategis dalam industri konstruksi, pertambangan, pertanian, dan infrastruktur di Indonesia. Alat berat seperti excavator, bulldozer, dan crane berperan penting dalam meningkatkan efisiensi proyek, sementara tingginya biaya pembelian menyebabkan banyak perusahaan memilih sewa guna usaha sebagai alternatif pengeluaran modal (capital expenditure). Pertumbuhan proyek infrastruktur pemerintah dan swasta mendorong perkembangan bisnis penyewaan alat berat, meskipun sektor ini menghadapi tantangan seperti fluktuasi permintaan dan persaingan harga yang ketat (Rahayu et al. 2022). Pengakuan pendapatan sewa menjadi aspek penting dalam pelaporan keuangan perusahaan penyewaan alat berat. Adopsi PSAK 73 yang menggantikan PSAK 30 merupakan langkah signifikan dalam konvergensi standar akuntansi Indonesia dengan IFRS 16. PSAK 73 mengharuskan hampir semua kontrak sewa diakui dalam neraca, meningkatkan transparansi dan komparabilitas laporan keuangan serta berdampak pada rasio keuangan perusahaan (Firmansyah et al. 2023). Hal ini berbeda dengan praktik sebelumnya yang membedakan sewa operasi dan sewa pembiayaan secara off-balance sheet. Penerapan PSAK 73 membawa tantangan bagi lessor, termasuk PT Bina Pertiwi yang merupakan pemain utama di industri penyewaan alat berat di Indonesia. Standar ini mengubah metode pengakuan pendapatan sewa dengan mengharuskan pengakuan aset sewa dan liabilitas sewa, sehingga mempengaruhi laporan keuangan dan

---

Analisis Perlakuan Akuntansi Dalam Pendapatan Sewa Alat Berat Berdasarkan PSAK 73 (Studi Kasus Pada PT. Bina Pertiwi)

metrik kinerja perusahaan. Perubahan ini menuntut penyesuaian sistem akuntansi dan proses pelaporan, sekaligus membuka peluang untuk memperluas bisnis leasing dan meningkatkan pendapatan (Suryanti 2023; Yani n.d.). Penelitian ini hadir dengan kebaruan berupa analisis komprehensif terhadap penerapan PSAK 73 pada PT Bina Pertiwi sebagai lessor alat berat di Indonesia, yang belum banyak mendapat perhatian dalam literatur lokal. Selain mengkaji dampak standar baru tersebut terhadap laporan keuangan, studi ini juga memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan akurasi dan kepatuhan pelaporan keuangan di sektor penyewaan alat berat. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan praktik akuntansi leasing sekaligus mendukung pengambilan keputusan manajemen yang lebih tepat. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 73 atas pendapatan sewa dilakukan oleh PT Bina Pertiwi dan menilai dampak penerapan standar tersebut terhadap laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan, peneliti, dan institusi akademik dalam memahami serta mengelola perlakuan akuntansi sewa sesuai PSAK yang berlaku.

## 2. Tinjauan Pustaka

Akuntansi keuangan adalah proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan entitas ekonomi yang disajikan dalam laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Tujuannya adalah memberikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, manajemen, dan regulator. Tujuan spesifik meliputi penyediaan informasi keuangan akurat, mendukung pengambilan keputusan investasi dan pengelolaan sumber daya, memastikan ketaatan pada standar akuntansi seperti PSAK dan IFRS, serta menyediakan dasar analisis kinerja dan perbandingan industri.

Pendapatan adalah arus masuk ekonomi dari aktivitas operasional utama entitas yang diakui menurut PSAK 72 melalui lima langkah: identifikasi kontrak, kewajiban kinerja, penentuan harga transaksi, alokasi harga, dan pengakuan saat kewajiban kinerja terpenuhi. Pengukuran pendapatan mempertimbangkan harga transaksi, estimasi ketidakpastian, waktu pengakuan yang tepat, serta pengungkapan kebijakan dan asumsi pengukuran. Sewa terdiri dari sewa pembiayaan (finance lease) dan sewa operasi (operating lease). Dalam sewa pembiayaan, risiko dan manfaat kepemilikan dialihkan ke lessee dengan pengakuan aset dan liabilitas oleh lessor serta pendapatan bunga yang diakui menggunakan metode efektif. Dalam sewa operasi, aset tetap di neraca lessor dan pendapatan sewa diakui secara linier. PSAK 73 yang mengadopsi IFRS 16 mempertahankan klasifikasi ini namun mengubah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan terutama bagi lessor, termasuk penggunaan tingkat bunga implisit dan pemisahan komponen sewa. PSAK 73 mulai berlaku di Indonesia pada 1 Januari 2020 menggantikan PSAK 30.

Standar ini menghilangkan perbedaan finance dan operating lease bagi lessee untuk meningkatkan transparansi dan menghilangkan praktik off-balance sheet financing. Dampak penerapan terutama terlihat pada peningkatan aset dan liabilitas di neraca lessee dan perubahan pola penyajian beban sewa. Standar ini mengatur sewa aset berwujud dan tidak berwujud serta mencakup pengecualian khusus seperti sewa jangka pendek dan nilai rendah. Bagi lessor seperti PT Bina Pertiwi, PSAK 73 mengharuskan klasifikasi sewa pembiayaan dan sewa operasi dengan pengakuan yang berbeda. Finance lease diakui sebagai piutang sewa pembiayaan, sedangkan operating lease dicatat sebagai aset sewaan dengan pengakuan pendapatan sewa linier. Lessor wajib melakukan

pengungkapan lebih rinci termasuk risiko kredit dan nilai residu aset serta menerapkan pemisahan komponen sewa dalam kontrak multi-komponen. PSAK 73 meningkatkan kepatuhan, transparansi, dan pengelolaan aset sewa.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme karena bertujuan untuk mengkonfirmasi kesesuaian perlakuan akuntansi terhadap standar yang berlaku serta implikasinya dalam konteks praktis dan teoritis. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yakni dengan cara mendeskripsikan fenomena yang ada berdasarkan data empiris dan kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan standar atau kerangka acuan yang ditetapkan (misalnya, PSAK/IFRS). Jenis ini bertujuan untuk tidak hanya menggambarkan fakta tetapi juga mengevaluasi bagaimana praktik tersebut berjalan, serta bagaimana potensi konsekuensinya terhadap pemangku kepentingan dan pengembangan teori.

Jenis penelitian ini efektif digunakan dalam akuntansi karena mampu memberikan gambaran praktis mengenai implementasi standar (*treatments*) sekaligus mengkaji gap antara praktik dan teori, sebagaimana dikemukakan oleh Baxter & Chua (2017) bahwa akuntansi bukan hanya soal angka, tetapi praktik sosial yang dibentuk oleh berbagai tekanan kelembagaan.

Objek kajian mencakup seluruh aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pendapatan dari aktivitas sewa alat berat, termasuk pengakuan aset hak-guna dan liabilitas sewa sesuai standar yang berlaku.

Subjek penelitian, yaitu PT Bina Pertiwi, dipilih karena memiliki lini bisnis utama pada penyewaan alat berat, sehingga representatif sebagai studi kasus. Selain itu, perusahaan ini dianggap relevan untuk mengevaluasi implementasi PSAK 73 sejak diberlakukan pada 2020, karena standar ini memaksa hampir seluruh sewa untuk dicatat di neraca (kecuali sewa jangka pendek atau bernilai rendah), sehingga memberikan dampak nyata pada struktur laporan keuangan perusahaan.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer Diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang memiliki wewenang dan pemahaman terkait penerapan akuntansi sewa di PT Bina Pertiwi, seperti Bapak Naufal Hilmi Ramadhan dan Ibu A. Aulia selaku Adh dan staff finance dan data Sekunder Diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan referensi yang mendukung analisis, seperti laporan keuangan perusahaan, salinan kontrak sewa, kebijakan akuntansi internal, serta sumber literatur akademik lainnya. Standar akuntansi relevan seperti PSAK 73 digunakan sebagai acuan normatif dalam membandingkan praktik perusahaan dengan peraturan yang berlaku. Literatur tambahan dari jurnal ilmiah dan buku teks akuntansi juga dimanfaatkan untuk memperkaya landasan teoritis penelitian ini (Nugroho & Kurniawati, 2021).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua teknik utama, yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara Dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur untuk memberikan ruang eksploratif dalam menggali informasi mendalam mengenai perlakuan akuntansi pendapatan sewa alat berat. Narasumber dalam wawancara ini adalah Pak Naufal Hilmi selaku Admin departemen Head dan Ibu A. Aulia Khairunnisa selaku Admin PT Bina Pertiwi yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi, serta menggunakan dua metode analisis data yaitu reduksi data dan penyajian data.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### *Prosedur dan Kebijakan Akuntansi Pendapatan Sewa di PT. Bina Pertiwi*

Penelitian ini mengungkap bahwa PT Bina Pertiwi sebagai lessor dalam bisnis penyewaan alat berat mengklasifikasikan seluruh transaksi sewa sebagai sewa operasi. Argumentasinya didasarkan pada beberapa kriteria utama sesuai PSAK 73, yaitu tidak adanya pengalihan kepemilikan aset kepada lessee (Naufal, Administration Department Head, PT Bina Pertiwi), tidak terdapat opsi pembelian dengan harga rendah yang hampir pasti dieksekusi, serta durasi masa sewa yang tidak mencakup sebagian besar umur ekonomis aset secara hukum. Selain itu, aset sewaan berupa forklift, genset, dan excavator merupakan unit standar, mudah dipindah tangankan tanpa modifikasi signifikan, yang memperkuat sifat operasional transaksi (PSAK 73 paragraf 61–67, 81). Pendapat tersebut diperkuat dengan bukti empiris bahwa tanggung jawab operasional sehari-hari dan biaya logistik dialihkan kepada lessee, sementara perawatan rutin dan risiko kerusakan struktural tetap menjadi beban lessor, kecuali kerusakan akibat kelalaian lessee. Pelaksanaan pembayaran sewa sesuai jadwal kontrak dengan nilai pembayaran didiskontokan mendekati nilai wajar aset juga memperlihatkan kesesuaian perlakuan akuntansi dengan esensi pembiayaan (PSAK 73 paragraf 62(a), 66).

Analisis mendalam terhadap masa sewa menunjukkan bahwa walaupun periode kontrak panjang dan dapat diperpanjang, masa sewa yang tidak dapat dibatalkan secara hukum membuat klasifikasi sewa pembiayaan tidak terpenuhi secara penuh. Pembahasan terkait aset sewaan yang bersifat standar tanpa modifikasi material memperkuat bahwa kontrol dan risiko aset tetap berada pada lessor, sehingga transaksi layak dikategorikan sebagai sewa operasi (PSAK 73 paragraf 18–21, 62(e)). Keseluruhan temuan ini menandakan penerapan PSAK 73 di PT Bina Pertiwi telah sesuai dengan standar, dengan pengakuan pendapatan sewa secara garis lurus selama masa sewa dan pengakuan aset tetap di neraca lessor. Hal ini menghasilkan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan menggambarkan kondisi ekonomi sebenarnya tanpa mengabaikan prinsip *faithful representation*.

Interpretasi hasil ini menunjukkan bahwa PT Bina Pertiwi berhasil mematuhi ketentuan PSAK 73 dalam pengelolaan sewa alat berat, memastikan stabilitas dan keandalan pelaporan keuangan perusahaan sekaligus mempertahankan posisi pengelolaan risiko dan manfaat pada pihak lessor. Implikasi praktisnya, perusahaan dapat mengendalikan risiko dan meningkatkan kepercayaan stakeholder melalui kepatuhan terhadap standar ini.

##### *Perlakuan Akuntansi Pendapatan Sewa Yang diterapkan PT. Bina Pertiwi*

Penelitian ini menemukan bahwa PT Bina Pertiwi sebagai lessor melakukan pengakuan pendapatan sewa secara bertahap dan menggunakan basis akrual sesuai PSAK 72 dan PSAK 73. Pendapatan sewa diakui sepanjang masa sewa secara linier, mencerminkan manfaat ekonomis yang diperoleh lessee, bukan berdasarkan penerimaan kas atau penandatanganan kontrak awal (Putri & Sudradjat 2022). Pendapatan diukur secara terpisah antara komponen tetap dan variabel, sedangkan insentif sewa dialokasikan proporsional selama masa sewa, sesuai prinsip pencocokan.

Menurut hasil wawancara dan dokumentasi laporan keuangan PT Bina Pertiwi, pengakuan pendapatan dilakukan dengan metode garis lurus (*straight-line*) pada masa sewa, dan pendapatan disajikan secara terpisah dari pendapatan lain sesuai PSAK 1 paragraf 82. Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi nilai aset sewaan, jadwal penerimaan sewa, risiko residu aset, dan informasi kredit lessee, yang meningkatkan

transparansi dan mengurangi asimetri informasi sesuai PSAK 73 paragraf 90–97. Analisis terhadap pencatatan akuntansi di cabang Makassar menunjukkan bahwa transaksi sewa dicatat saat penandatanganan berita acara serah terima unit, walaupun pembayaran dilakukan kemudian. Pencatatan piutang sewa dan pendapatan secara bersamaan menegaskan penerapan basis akrual, sehingga pendapatan diakui tepat waktu tanpa menunggu penerimaan kas.

Interpretasi hasil ini memperlihatkan kesesuaian antara ketentuan PSAK 73 dan praktik pengakuan pendapatan PT Bina Pertiwi. Pendekatan linier dan akrual dalam pelaporan pendapatan sewa memberikan kestabilan arus kas dan meningkatkan kualitas transparansi laporan keuangan. Dengan demikian, penerapan standar tersebut berkontribusi positif terhadap keandalan dan relevansi pelaporan keuangan perusahaan.

#### *Dampak Penerapan PSAK 73 Terhadap Laporan Keuangan PT. Bina Pertiwi*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bina Pertiwi mengklasifikasikan seluruh transaksi sewa sebagai sewa operasi sesuai PSAK 73, sehingga aset hak guna dan liabilitas sewa tidak diakui dalam neraca. Pendapatan sewa diakui secara garis lurus selama masa kontrak, menciptakan arus pendapatan yang stabil dan meningkatkan keterbandingan laporan keuangan antarperiode. Biaya langsung awal dikapitalisasi dan dialokasikan secara sistematis sesuai ketentuan PSAK 73.

Dalam laporan laba rugi, pendapatan sewa disajikan terpisah dari pendapatan operasional lain, sedangkan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi lengkap terkait jenis aset, nilai residu, jadwal penerimaan kas, dan risiko kredit penyewa, sesuai ketentuan PSAK 1 dan PSAK 73. Analisis perbandingan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73 menunjukkan tidak ada perubahan material pada struktur aset dan liabilitas karena sifat kontrak yang operasional. Meski demikian, penerapan PSAK 73 memberikan dampak positif secara kualitatif terhadap kualitas informasi keuangan, terutama dalam meningkatkan faithful representation, keterbandingan, dan transparansi pelaporan. Dengan demikian, penelitian ini mengonfirmasi kepatuhan PT Bina Pertiwi terhadap PSAK 73 serta manfaat potensial standar ini bagi kualitas pelaporan keuangan perusahaan.

#### **5. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis menarik kesimpulan Bahwa PT Bina Pertiwi mengimplementasikan perlakuan akuntansi sewa sesuai dengan ketentuan PSAK 73 yang mengatur klasifikasi dan pengakuan transaksi sewa. Seluruh kontrak sewa alat berat diklasifikasikan sebagai sewa operasi karena tidak terpenuhinya kriteria pengalihan kepemilikan, opsi beli dengan harga rendah, masa sewa yang mencakup sebagian besar umur ekonomis aset, dan sifat khusus aset sewaan. Risiko dan manfaat kepemilikan aset tetap berada pada lessor, yaitu PT Bina Pertiwi. Pengakuan pendapatan sewa dilakukan secara garis lurus sepanjang masa sewa dengan prinsip akrual, serta pengukuran pendapatan memperhatikan komponen tetap dan variabel sesuai dengan PSAK 72 dan PSAK 73. Perusahaan juga melakukan pengungkapan secara lengkap dan transparan pada Catatan atas Laporan Keuangan sesuai standar yang berlaku. Dan Penerapan PSAK 73 berdampak pada pelaporan keuangan PT Bina Pertiwi dengan menghasilkan klasifikasi sewa operasi yang mengakibatkan tidak adanya pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa di neraca perusahaan. Metode pengakuan pendapatan sewa secara linier selama masa kontrak menghasilkan arus pendapatan yang stabil serta meningkatkan keterbandingan dan

transparansi laporan keuangan antarperiode. Biaya langsung awal dikapitalisasi dan dialokasikan secara sistematis sehingga menjaga relevansi dan reliabilitas pelaporan.

## Referensi

1. Alyssa Qatrun Nada, Lintje Kalangi, dan Priscillia Weku (2022). Evaluasi Penerapan PSAK No. 73 pada PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo. Universitas Sam Ratulangi. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lppmekosobudkum/article/view/43775>
2. A. R. C. G., & B. K. C. L. (2018). How will the new lease accounting standard affect the relevance of lease asset accounting? <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S088261101830110X?via%3Dihub>
3. Ayu, F., Gurning, S., Ritonga, S., & Meianti, A. (2022). Analisis Manajemen Risiko Penggunaan Sewa Guna Usaha ( Leasing ) di Indonesia. 3(3), 440–449.
4. Baxter, J., & Chua, W. F. (2017). Accounting as an affective technology: A study of circulation, agency and entanglement. *Accounting, Organizations and Society*, 61, 1–20. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2017.07.001>
5. Brolin, A. R. (2024). *Evaluation Of The Application Of Income Tax On Rent For Domestic Taxpayers After The Enactment Of Psak 116 : A Case Study At The Madya Tax Service Office West Jakarta. Psak 116*, 798–815.
6. Dea Ananda Malango, David P. E. Saerang, Robert Lambey (2024). Analisis perlakuan akuntansi sewa berdasarkan PSAK No.73 pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo. Universitas Sam Ratulangi. <https://doi.org/10.58784/rapi.216>
7. Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, T. D. W. (n.d.). *Intermediate Accounting, 17e Rockford Practice Set*. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=FES0DWAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=+Kieso,+D.+E.,+Weygandt,+J.,+%26+Warfield,+T.+D.,+\(2019\).+&ots=su7k8ZGYO\\_&sig=UjBC4-c562mgiZzv4GwA7WYm97Y&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=FES0DWAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=+Kieso,+D.+E.,+Weygandt,+J.,+%26+Warfield,+T.+D.,+(2019).+&ots=su7k8ZGYO_&sig=UjBC4-c562mgiZzv4GwA7WYm97Y&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
8. Firmansyah, A., Elisabeth, E., & Trisnawati, E. (2023). Indonesia's Capital Structure And Company Profitability Before And After The Implementation Of PSAK 73. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 7(1), 73–85. <https://doi.org/10.46367/jas.v7i1.1127>
9. Gamalasari, D., & Wardhani, N. K. (2024). Analisis Dampak Implementasi PSAK 73 Bagi Lessee dan Lessor. *Owner*, 8(3), 3109–3123. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2262>
10. Ginting, A. P., Permana, M. D. C., & Firmansyah, A. (2023). Penerapan PSAK 73 atas Profitabilitas, Struktur Modal dan Tangibility pada Perusahaan. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(2), 259. <https://doi.org/10.21632/saki.5.2.259-273>
11. Kustiani, N. A., Arfiansyah, Z., & Kusumawati, R. (2023). Impact of Implementation of PSAK 73 Leases on The Quality of Financial Information Company Registered in Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.10-10-2023.2342203>
12. Malango, D. A., Saerang, D. P. E., & Lambey, R. (2021). Analisis perlakuan akuntansi sewa berdasarkan PSAK No. 73 pada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*. <https://doi.org/10.58784/rapi.216>
13. Malango, D. A., Saerang, D. P. E., & Lambey, R. (2024). Analisis perlakuan akuntansi sewa berdasarkan PSAK No. 73 pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 391–404. <https://doi.org/10.58784/rapi.216>
14. Maulana, T. M., & Merdekawati, E. (2022). Dampak Perlakuan Akuntansi Sewa Aset Sebelum Dan Sesudah Diterapkan Psak 73 Pada Laporan Keuangan Pt Xyz. *Account*, 9(1). <https://doi.org/10.32722/acc.v9i1.4581>
15. Putri, L., & Aziza, N. (2024). *Comparison Of Financial Performance Based On The Implementation Of PSAK 30 And PSAK 73 On Leases In Energy Industry Companies*. 12(1), 1007–1016.
16. Putri, N. T., & Sudradjat Sudradjat. (2022). *Tinjauan atas Pengakuan, Pencatatan dan Pelaporan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 pada PT ABC*. <https://doi.org/https://doi.org/10.37641/jabkes.v2i2.1496>
17. Rahayu, D., Rahmawati, I. D., & Hanif, A. (2022). Pembentukan Model Pengakuan Sewa Yang Ideal Berdasarkan PSAK 73 Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan Jasa Transportasi di Indonesia. *Owner*, 6(2), 1570–1585. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.774>
18. Sabrina, S., & Challen, A. E. (2023). Analisis Perbandingan Rasio Keuangan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Psak 73 Pada Pt Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. *Jurnal Pundi*, 7(1), 15. <https://doi.org/10.31575/jp.v7i1.439>
19. Simatupang, T., & Sridharan, R. (2017). *A critical analysis of supply chain issues in construction heavy equipment*. December. <https://doi.org/10.1080/15623599.2016.1142250>
20. Sugiarti Wulandari (2016). Analisis Pembiayaan melalui Finance Lease dan aplikasi perlakuan akuntansi Leasing berdasarkan PSAK 30 tahun 2012 pada PT Adira Dinamika Multi Finance Tanjungpinang. Universitas Maritim Raja Ali Haji. <https://id.scribd.com/document/500000530/jurnal-sugiarti-wulandari>
21. Sugiono. (2020). Akuntansi Keuangan. Alfabet.
22. Suryanti, H. (2023). Implementation of PSAK 73: Study of Financial Ratios of PT Aneka Tambang, Tbk. *International Journal of Social Service and Research*, 3(11), 2860–2867. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i11.602>
23. Thalia, T. (2023). Isu Pasca Implementasi Psak 73 Dari Sudut Pandang Eksternal Audit. *Owner*, 7(2), 1807–1814. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1378>
24. Warfield, T. D., & Martani, D. (2020). Akuntansi Keuangan Menengah. Salemba Empat
25. Yani, A. (n.d.). *Penerapan psak 73 terhadap laporan keuangan dalam meningkatkan relevansi laporan keuangan*. 34–48. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i1.5689>